

**LAPORAN PENELITIAN**

**KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI IMPLEMENTASI MEA 2016:  
STUDI TENTANG EKONOMI KREATIF  
DI KABUPATEN BULELENG DAN BANYUWANGI**

Oleh:

Humphrey Wangke

Adirini Pujayanti

Lisbet

Pusat Penelitian BKD DPRRI

2016

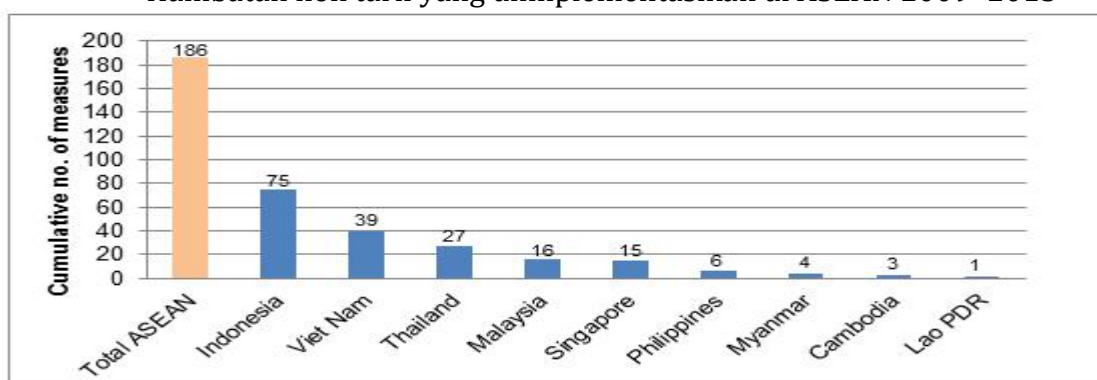
## EXECUTIVE SUMMARY

### I. Latar Belakang

Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengakui adanya pergerakan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN untuk tenaga terdidik, barang, jasa dan investasi. Dengan pergerakan bebas ini, ASEAN akan menjadi pelaku ekonomi global melalui prestasi yang dicapai oleh masing-masing negara anggotanya. Untuk itu negara-negara ASEAN harus mampu meningkatkan dan mengembangkan daya saing dan peluang yang dimiliki untuk memasuki pasar global. Jika berhasil memajukan kerjasama melalui MEA, maka ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia setelah Tiongkok, AS, Jepang, Jerman, Prancis dan Inggris dengan prediksi PDB mencapai 4,7 trilyun dolar AS pada tahun 2020. Peluncuran MEA menjadi bagian dari strategi yang diambil oleh para pemimpin ASEAN agar ASEAN menjadi kawasan yang lebih atraktif bagi negara-negara maju di luar kawasan.

Mayoritas negara ASEAN umumnya masih meragukan kapasitas negaranya untuk bersaing di MEA. Indonesia termasuk salah satu negara di ASEAN yang ragu akan kemampuannya dalam menghadapi MEA. Keraguan negara-negara ASEAN dalam menghadapi MEA dapat dilihat dari semakin meningkatnya hambatan nontarif yang diberlakukan untuk melindungi pasar dalam negerinya. Dari tahun 2009-2013 tidak kurang dari 186 aturan nontarif diberlakukan oleh negara-negara ASEAN. Hambatan nontarif ini diberlakukan oleh negara-negara besar di ASEAN yaitu: 75 oleh Indonesia, 39 oleh Viet Nam, 27 oleh Thailand, 16 oleh Malaysia, and 15 oleh Singapura (Tabel 1).

Tabel 1  
Hambatan non tarif yang diimplementasikan di ASEAN 2009–2013



Sumber: "Global Trade Alert database" (<http://www.globaltradealert.org/>, diakses October 2014).

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah tingkat daya saing yang belum optimal dan iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung kalangan dunia usaha sehingga Indonesia diragukan akan menjadi pemain kunci dalam MEA. Sebuah survei yang dilakukan oleh LIPI memperlihatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pengusaha Indonesia tentang MEA.<sup>1</sup> Kurangnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap proses pembentukan MEA serta rendahnya kualitas tenaga kerja, telah menempatkan Indonesia dalam resiko menjadi negara konsumen dan pasar yang menjanjikan untuk produksi barang dan jasa dari negara ASEAN lainnya.<sup>2</sup> Di samping masyarakat pada umumnya, kurangnya perhatian terhadap MEA juga terjadi di kalangan pengusaha terutama pengusaha menengah dan besar. Ketua APINDO Hariyadi Budi Santoso mengatakan, perusahaan Indonesia ragu-ragu untuk melakukan ekspansi terutama ke negara-negara ASEAN karena lebih menyukai ekspor ke negara-negara Eropa dan AS yang secara ekonomi menguntungkan. Karena itu, menjadi tantangan bagi pengusaha Indonesia untuk melakukan ekspansi dan mendirikan cabang perusahaan di negara-negara ASEAN jika ingin menjadi pemain kunci di MEA. Tidak dapat dibayangkan bahwa MEA dapat berjalan tanpa Indonesia yang memiliki populasi dan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN.<sup>3</sup>

Dengan kondisi seperti itu, penelitian ini hendak meneliti kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi MEA di sektor ekonomi kreatif. Melalui permasalahan seperti tersebut, ada tiga hal yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ekonomi kreatif mampu membentuk persepsi kekuatan perekonomian Indonesia di luar negeri (*brand image*) melalui diplomasi publik?
2. Bagaimana sumber daya manusia mampu memaksimalkan potensi pariwisata sebagai kunci perekonomian Indonesia dalam menghadapi implementasi AEC 2016?
3. Bagaimana diplomasi yang seharusnya dijalankan Indonesia untuk meningkatkan investasi dan perdagangan agar mampu bersaing didalam AEC

## Metode Penelitian

Data hasil penelitian lapangan dikumpulkan utamanya melalui wawancara dengan didukung observasi, studi literatur dan dokumen. Penentuan narasumber penelitian dilaksanakan melalui teknik *purposive sampling*.<sup>4</sup> Materi wawancara terdiri

---

<sup>1</sup> “Pemahaman terhadap MEA Masih Rendah”, *Kompas*, 3 Desember 2015.

<sup>2</sup> Margareth S. Aritonang dan Imaduddin Razak, “Indonesia Challenged to benefit from AEC”, *The Jakarta Post*, 14 Januari 2016.

<sup>3</sup> B. A. Hamzah, “Sinking the Ships: Indonesia’s Foreign Policy under Jokowi”. *RSIS Commentary*, No. 016, 20 Januari 2016

<sup>4</sup> *Ibid*

dari sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan dan diajukan kepada informan secara tatap muka terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan bentuk-bentuk pertanyaan yang diajukan, wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.

Didalam penelitian ini, peneliti mengunjungi kawasan yang menjadi sentra industri kreatif. Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara.

Penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti: arsip-arsip penting, kebijakan, dan lainnya.

Untuk mendapatkan data primer, penelitian ini diadakan di dua kabupaten yaitu Buleleng (Provinsi Bali) tanggal 14-20 Maret 2016 dan Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur) tanggal 18-24 April 2016..

## **Hasil Penelitian**

### **1. Ekonomi Kreatif sebagai *Nation Brand* Indonesia**

Pengembangan ekonomi kreatif pada lima tahun ke depan (2015-2019) telah mulai disusun di masa Menparekraf Mari Elka Pangestu dengan melibatkan seluruh *stakeholder* ekonomi kreatif (pelaku/praktisi, akademisi, komunitas maupun instansi terkait). Terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif yang akan dikembangkan, yaitu: Aplikasi dan pengembangan permainan, Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Fashion, Film, animasi dan video, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Penerbitan, Periklanan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Televisi dan radio.

Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pengekspor produk kreatif yang besar karena memiliki modal potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya yang besar. Pengembangan sektor ekonomi kreatif juga bernilai strategis karena tidak memiliki ketergantungan pada energi fosil yang jumlahnya semakin terbatas dan terus tumbuh dalam bentuk UKM yang dapat berperan penyangga ekonomi rakyat ditengah melemahnya perekonomian dunia. Secara khusus, sektor ekonomi kreatif yang bergerak di sektor kriya kerajinan rakyat telah membuka lapangan kerja yang luas bagi tenaga kerja trampil Indonesia.

## **Tata Kelola Pariwisata di ASEAN**

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terdapat lima arus bebas, yakni arus bebas barang, jasa, investasi, aliran modal yang lebih bebas dan tenaga kerja terampil. Kelima arus bebas ini diatur dalam mekanisme perjanjian saling pengakuan kesetaraan atau lebih dikenal dengan sebutan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). MRA merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh ASEAN untuk mengharmonisasi standar dan kesesuaian terkait dengan kualifikasi dari tenaga kerja terampil yang akan bekerja di sektor jasa namun tetap mempertahankan kehususannya dari masing-masing negara anggota ASEAN. Melalui MRA, setiap negara telah menyepakati seluruh anggota negara ASEAN untuk mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian atau sertifikat.

Kabupaten Buleleng Provinsi Bali mempersiapkan tenaga kerja terampil di sektor pariwisata agar mampu bersaing dengan tenaga kerja terampil ASEAN, antara lain melalui:<sup>5</sup> pengembangan serta percepatan program sertifikasi kompetensi profesi pencari kerja di sektor pariwisata; penerbitan Peraturan Bupati No. 63 tahun 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Pencari Kerja dan Karyawan Pada Sektor Industri Pariwisata, optimalisasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang memiliki jurusan Pariwisata agar dapat menyertifikasi para siswanya di masing-masing LPKS.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng juga melaksanakan beberapa program dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja terampil di sektor pariwisata seperti memberikan pelatihan terhadap para pemandu wisata di Kabupaten Buleleng dengan bekerjasama dengan Pihak Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Materi yang diberikan kepada para pemandu wisata adalah Bahasa Inggris, budaya Bali serta perilaku sebagai seorang guide. Program lainnya adalah pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di DTW-DTW Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan Undiksha Singaraja.<sup>6</sup>

Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan beberapa event seperti Buleleng Festival, Lovina Festival, dan Pesta Kesenian Bali, yang sering memberikan ruang bagi para pengrajin, maupun seniman untuk beraktivitas maupun memasarkan hasil karya/produknya yang sekaligus merupakan sarana promosi bagi mereka, dan

---

<sup>5</sup>Bahan tertulis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, tanggal 29 Maret 2016 di Buleleng.

<sup>6</sup>Bahan tertulis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, tanggal 29 Maret 2016 di Buleleng.

pada dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian sudah mempunyai program tetap untuk mengikuti *event-event* promosi tentang kerajinan UKM di seluruh Indonesia dengan melibatkan para pengrajin maupun tenaga kerja terampil dalam sektor ini.<sup>7</sup>

Selain Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja terampil agar dapat bersaing dengan tenaga kerja terampil ASEAN lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi telah berupaya meningkatkan tenaga kerja terampil dengan mengenali sektor-sektor yang berpotensi antara lain sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM. Selanjutnya dilakukan pemetaan dan analisa terhadap kondisi tenaga kerja di 8 sektor pekerjaan yang terbuka dalam MEA yakni Akuntansi, Teknik, Tenaga Survei, Arsitektur, Keperawatan, Kesehatan, Perawat Gigi dan Tenaga Pariwisata.

Dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja terampil di Kabupaten Banyuwangi dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi profesi agar tenaga kerja terampil di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan keahlian di sektor tertentu dan diprioritaskan.<sup>8</sup>

Secara umum Kabupaten Banyuwangi mempunyai 32 orang tenaga didik yang sudah berlisensi sebagai pramuwisata, dan lebih dari 50 orang tenaga didik yang belum berlisensi. Setiap satu bulan sekali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi melakukan rapat evaluasi dan motivasi dengan PHRI Banyuwangi, dan *Travel Agent* maupun HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia). Salah satu hal yang mendasar yang selalu di tekankan di dalam rapat tersebut adalah peningkatan sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi, namun menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat khususnya yang bergerak di pariwisata.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil di sektor pariwisata diperlukan kerja sama oleh seluruh pihak, seperti Kementerian Pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Association of Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata. Tujuan dari *Skill Development Fund* adalah untuk mempercepat implementasi sistem pelatihan kerja berbasis kompetensi melalui percepatan pengembangan standar kompetensi, penerapan program pelatihan berbasis kompetensi, dan pelaksanaan sertifikasi

---

<sup>7</sup>Bahan tertulis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, tanggal 29 Maret 2016 di Buleleng.

<sup>8</sup>Bahan tertulis dari Disnakertrans Banyuwangi di Banyuwangi Tanggal 21 April 2016 di Banyuwangi.

kompetensi kerja. Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) adalah untuk mendukung asosiasi industri untuk mengembangkan SKKNI baru sesuai kebutuhan MEA 2015 dan memperbarui SKKNI yang telah ada. Sementara Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, mendukung lembaga pelatihan pemerintah dan swasta untuk mengembangkan modul pelatihan berbasis standar kompetensi dan melengkapi sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan industri (untuk mendapatkan akreditasi). Sertifikasi kompetensi bertujuan untuk mengembangkan skema sertifikasi dan asesor sesuai kebutuhan industri dan meningkatkan akses tenaga kerja mengikuti sertifikasi. Jumlah tenaga kerja terampil di sektor pariwisata yang sudah terverifikasi pada tahun 2015 sebanyak 20.090 orang atau sebesar 18 persen.<sup>9</sup>

Pemerintah kabupaten Banyuwangi sudah melakukan sejumlah langkah terobosan untuk mempersiapkan masyarakatnya menghadapi implementasi MEA 2016. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas produknya. Untuk keperluan ini, pemerintah kabupaten telah mempersiapkan program Pesona Desa yang sasarannya adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan berfokus kepada tiga pilar yakni pemuda, perempuan dan netizen mengingat tiga pilar ini merupakan ujung tombak kemajuan desa. Melalui pola pendekatan semacam ini, pemerintah kabupaten menargetkan Banyuwangi akan mampu bertahan dari serbuan produk internasional saat memasuki MEA. Banyaknya UMKM yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif tentunya akan meningkatkan daya saing perekonomian para pelaku maupun warga setempat.

### **Peningkatan Sektor Perdagangan dan Investasi**

Menghadapi MEA, masalah terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Kondisi seperti ini tidak jarang merugikan masyarakat karena tidak ada perpaduan antara yang dibangun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kepala daerah lebih memprioritaskan pemenuhan janjinya selama pilkada daripada mengikuti rencana pembangunan nasional. Namun yang terpenting, kondisi seperti ini terjadi karena lemahnya kordinasi antara daerah dan pusat. Karena itu penataan hubungan

---

<sup>9</sup>Bahan Paparan Rahmat Pramono, “Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pengaruhnya Bagi Ekonomi Indonesia” pada Seminar di Depok tanggal 3 Mei 2016.

antara pemerintah pusat dan daerah menjadi yang utama. Selama kordinasi belum tertata dan pengawasan dari pusat belum efektif, pembangunan nasional tidak akan selaras dengan pembangunan daerah.

Pentingnya kordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena untuk memudahkan pengembangan konektivitas antar daerah di Indonesia. Konektivitas meliputi berbagai hal seperti fisik, pendidikan, pariwisata dan digital. Dengan kondisi seperti ini pembentukan MEA akan menghadirkan peluang dan tantangan. Karena itu negara-negara ASEAN perlu berkolaborasi dan menciptakan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan daya saing global. Konektivitas itu akan menghubungkan berbagai industri kunci seperti pariwisata, pangan dan energi yang akan terus bergerak maju dan berkelanjutan. Konektivitas atau kolaborasi pada sisi yang lain merupakan kompetisi. Kunci keberhasilan dalam kompetisi adalah efisiensi. Indonesia harus mampu menciptakan efisiensi. Selain infrastruktur, Indonesia juga membangun sumber daya manusia dan sumber daya sosial. Konektivitas antar negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan pelaksanaan MEA.

Setiap anggota ASEAN diharapkan mampu membawa ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Sebagai satu regional. ASEAN menghadapi tantangan ekonomi bersama. Di sektor perdagangan barang, kemajuan terpenting adalah semakin mempermudah perdagangan antar anggota ASEAN karena berkurangnya hambatan tarif dan non tarif.<sup>10</sup> Harmonisasi regulasi untuk beberapa produksi telah tercapai seperti produk otomotif, elektronik, karet dan produk kayu. Untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan masalah perdagangan intra ASEAN telah disepakati dibentuk sistem solusi ASEAN untuk investasi, jasa dan perdagangan.

ASEAN ingin meningkatkan perdagangan internalnya yang pada tahun 2015 mencapai 2,53 trilyun rupiah. Pasar ekspor ASEAN yang sekitar 25,5 persen dari total ekspor ASEAN ke dunia juga belum optimal. Karena itu upaya pengutan ekonomi ASEAN dimaksudkan bahwa ASEAN akan mengandalkan pada pasarnya sendiri. Untuk mencapai itu, strategi yang digunakan ASEAN adalah merampungkan cetak biru MEA, menurunkan hambatan non tarif antar negara ASEAN, memberikan fasilitas sertifikasi mandiri, pengakuanb standar produk, dan penyederhanaan kepastian.

---

<sup>10</sup> Layton, B. (2008), 'Trade Facilitation: A Study in the Context of the ASEAN Economic Community Blueprint', in Soesastro, H. (ed.), *Deepening Economic Integration- The ASEAN Economic Community and Beyond*-, ERIA Research Project Report 2007-1-2, Chiba: IDE-JETRO, pp.76-100.



Indonesia akan bersaing dengan negara-negara ASEAN untuk memanfaatkan pasar intra ASEAN. Indonesia berupaya menjadi negara basis industri otomotif di ASEAN, baik yang berasal dari Jepang maupun Uni Eropa. Indonesia juga mengupayakan agar sejumlah produk ekspornya memiliki kandungan lokal minimal 40 persen. Hal ini penting karena ASEAN berkomitmen memberikan tarif preferensi atau tarif bea masuk berdasarkan perjanjian jika kandungan lokal produk itu minimal 40 persen.

Jika memperhatikan kesiapan Kabupaten Buleleng dan Banyuwangi dalam menyambut berlakunya MEA tahun 2016, maka terlihat bahwa masyarakat luas dan pemerintah kabupaten telah siap dengan adanya MEA. Namun sayangnya Indonesia belum mengoptimalkan potensi pasar yang ada. Indikasi ke arah itu bisa dilihat dari nilai ekspor Indonesia ke pasar kawasan ini pada 4 bulan pertama tahun 2016 justru turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, sebagaimana dikutip oleh harian Kompas edisi 28 Mei 2016, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN pada periode Januari-April 2016 sebesar 8.826 miliar dolar AS atau turun 3,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang sebesar 9,182 miliar dolar AS.<sup>11</sup> Ekspor nonmigas Indonesia ke negara-negara ASEAN pada tahun periode Januari-April 2016 berkontribusi sebesar 21,29 persen terhadap total ekspor Indonesia sebesar 40,703 miliar dolar AS.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua kabupaten ini menegaskan Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan industri kreatif menjadi basis produksi di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, Presiden Joko Widodo antara lain berusaha menarik investor asing masuk ke Indonesia untuk mengatasi ketertinggalan Indonesia di sektor infrastruktur. Kemudahan-kemudahan diberikan oleh pemerintah Joko Widodo agar kemajuan infrastruktur di Indonesia bisa mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia. Berkembangnya infrastruktur akan mempercepat konektivitas antar daerah di Indonesia sehingga harga-harga barang menjadi lebih murah.

Berbagai pertemuan internasional baik bilateral maupun regional dan multilateral dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agar percepatan pembangunan di Indonesia dapat terbantu dengan adanya kerja sama luar negeri sehingga Indonesia benar-benar siap memasuki MEA di tahun 2016. Konektivitas antar negara menjadi

---

<sup>11</sup> “MEA Belum Optimal”, *Kompas*, 28 Mei 2016, hal. 18.

sasaran berikutnya pemerintah Indonesia jika antar daerah sudah terlaksana. Tiongkok, AS, UE, Jepang dan Korea Selatan menjadi negara-negara yang paling sering menjadi sasaran kerjasama Indonesia. Diplomasi yang dilakukan bukan hanya oleh Presiden Joko Widodo saja tetapi juga oleh pelaku usaha, dan para diplomat yang ditempatkan di luar negeri. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai pameran di luar negeri seperti di Hongkong dan Madrid merupakan contoh dari berbagai upaya diplomasi Indonesia untuk menarik investor dan juga turis mancanegara.